

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Syarifuddi, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A.P. Parlindungan, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Balai Pustaka (persero), Jakarta
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Pres, Padang
- Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam*, Tesis, UNDIP, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Perda Provinsi Sumatera Barat no. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai atas tanah

Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1998

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1998 tentang Perubahan HGB atau Hak Pakai atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 258/Kpts-II/1987

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK.525.26-275-1986 jo. Nomor 14/Sekr/BKPMMD 1988 tentang izin pencadangan tanah serta izin lokasi dan pembebasan tanah kepada PT. Mutiara Agam

Surat Menteri Pertanian RI Nomor KB.320/457/Mentan/VII/1984

Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 124/I/PMDN/1986 jo. Nomor 336/III/PMDN/1991

Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 525.30/784/525.3/88

Surat Pengantar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 540.1.738/HAT-BPN/1990

C. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulyat>

<https://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/kedudukan-hak-ulyat-yang-telah-menjadi-hak-guna-usaha-setelah-berlakunya-peraturan-menteri-negara-agraria/>

<http://industri.bisnis.com/read/20170202/99/625318/sofyan-djalil-pengusaha-sawit-wajib-bangun-kebun-plasma>

<https://www.slideshare.net/bundatea/kebun-plasma-pola-kemitraan>

<http://kelapasawituntukbumi.blogspot.co.id/2011/11/managemen-pengelolaan-kebun-plasma.html>

<http://www.agamkab.go.id/?agam=profil>